



**PKS**

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024**

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
E-mail: [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com)  
HP. 0812-6791-240*

DITERIMA DARI : Pihak Terkait	
NO. 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 06 Mei 2024
JAM	: 14:55:02

**KETERANGAN**

**PIHAK TERKAIT**

**PROVINSI : ACEH**

**DPR RI**

**(Daerah Pemilihan Aceh I)**

**NOMOR PERKARA:**

**13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PEMOHON:**

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**



**PKS**

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

**ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024**

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,*

*E-mail: [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com)*

*HP. 0812-6791-240*

=====

Jakarta, 06 Mei 2024

**Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Partai Keadilan Sejahtera – PKS)  
Terhadap Perkara Nomor 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya  
(Gerindra)**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- a. Nama : **AHMAD SYAIKHU**  
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1965  
NIK : 3275082301650007  
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat  
Partai Keadilan Sejahtera  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor  
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia  
Nomor Telepon : 0812-6791-240  
Email : [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com)
- b. Nama : **ABOE BAKAR**  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1964  
NIK : 3276021516040006  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat  
Partai Keadilan Sejahtera  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor  
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia  
Nomor Telepon : 0812-6791-240  
Email : [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan sebagai berikut:

**PROVINSI: ACEH**

**DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I**

Berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.19/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024; dan
2. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.19.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

NAMA	NIA
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
5. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
6. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
7. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
8. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
9. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
10. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
11. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
12. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
13. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425
14. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
15. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010
16. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
17. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	NIA. 16.05475
18. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163
19. Ismail Ngganggon, S.H.	NIA. 10.00704

20. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393
21. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888
22. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
23. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
24. Muhammad Arnif, S.H.	NIA. 15.03310
25. Taufiq Hidayat, S.H.	NIA. 10.02152
26. Faisal, S.H.	NIA. 0530.01.19.70

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di : *MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail : phpu.pks.2024@gmail.com*, bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk kepentingan hukum Partai Keadilan Sejahtera sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara PHPU Nomor 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR RI dalam Pemilu tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - 1) Bahwa dalam mendalilkan pergeseran suara yang dilakukan oleh Partai lain, Pemohon tidak mendalilkan berapa perolehan suaranya, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan

dengan perolehan suaranya, sehingga Permohonannya menjadi kabur.

- 2) Bahwa Pemohon tidak menguraikan di TPS-TPS mana saja terjadi penggelembungan suara oleh Termohon/Pihak Terkait, sehingga Permohonan ini tidak beralasan menurut hukum
- 3) Bahwa Pemohon juga tidak menyebutkan dalil-dalil dan atau kondisi (kejadian khusus) yang memberinya hak untuk mengajukan Permohonan untuk meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. (PT-1) dan atau meminta Pemungutan Suara Ulang.

## **1.2. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023, Pihak Terkait dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pihak Terkait adalah

salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan); (PT-2).

- 3) Bahwa di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pihak Terkait adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (PT-3).
- 4) Bahwa di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pihak Terkait adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 8. (PT-4).
- 5) Bahwa di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pihak Terkait adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. (PT-5)

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo*.

### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHOHAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional dalam PEMILU tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan Permohonannya adalah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
- 2) Bahwa Pemohon hanya menyebutkan bahwa Permohonannya diajukan dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, tanpa menyebutkan pada jam, menit dan atau detik beberapa Pemohon mendaftarkan Permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 tersebut.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon harus dibuktikan apakah diajukan dengan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau masih dalam tenggang waktu, jika lewat waktu, maka sepatutnya ditolak.

### **1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

#### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada Permohonan awalnya, Pemohon mengajukan Petitum dengan amar sebagai berikut:
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 2) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 **sepanjang Daerah Pemilihan Aceh I untuk pengisian anggota DPR RI.**

- 3) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I, sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Persandingan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I Menurut Pemohon**

<b>Partai</b>	<b>Perolehan Suara Pihak Terkait</b>	<b>Perolehan Menurut Pemohon</b>
GERINDRA	104.005	104.005
PDIP	133.292	98.120
PKS	119.581	98.750
PKB	106.667	80.000

- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Namun dalam Perbaikan Permohonannya, Pemohon mengajukan perubahan Petitum pada poin 3 dengan perubahan sebagai berikut:

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I, setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Perubahan Petitum Persandingan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I Menurut Pemohon**

Partai	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon
GERINDRA	104.005	104.005 + Hasil PSU
PDIP	133.292	98.120 + Hasil PSU
PKS	119.581	98.750 + Hasil PSU
PKB	106.667	80.000 + Hasil PSU

3. Bahwa Pihak Terkait (PKS) menolak atas perubahan dan/atau penambahan Petitum yang dilakukan Pemohon, karena Perubahan tersebut menimbulkan kerugian kepada Pihak Terkait (PKS) dan:

**(1) Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:

- i. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
- ii. **permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

- b. Pemohon dalam Permohonannya ini tidak menjelaskan pergeseran suara, penggelembungan suara dilakukan oleh siapa, dan ditujukan kepada siapa. Pergeseran suaranya tidak jelas. TPS-TPS yang terjadi penggelebungannya, tidak dijelaskan di mana kejadiannya dan kapan terjadi, serta apa yang telah dilakukan Pemohon dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.
- c. Bahwa dalam mendalihkan pergeseran suara yang dilakukan oleh Partai lain, **Pemohon tidak mendalihkan berapa perolehan suaranya, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan perolehan suaranya, sehingga Permohonannya menjadi kabur.**
- d. Bahwa Pemohon tidak menguraikan di TPS-TPS mana saja terjadi penggelembungan suara oleh Termohon/Pihak Terkait, sehingga Permohonan ini tidak beralasan menurut hukum
- e. Bahwa Pemohon juga tidak menyebutkan dalil-dalil dan/atau kondisi (kejadian khusus) yang memberinya hak untuk mengajukan Permohonan untuk meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. (PT-1) dan atau meminta Pemungutan Suara Ulang.

- f. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

*(b) uraian yang jelas mengenai:*

- 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

- g. Pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa:

- 1. pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- 2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
  - a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
  - c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk*

*elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

- h. Pasal 373 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa:**
- a) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan, menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*
  - b) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan, kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*
  - c) *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
  - d) *Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.*

Faktanya, Pemohon tidak mendalilkan adanya suatu kejadian khusus yang dapat menjadi alasan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.

Ke-semua syarat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tidak terpenuhi alasan/unsurnya pada Permohonan Pemohon. Oleh karena itu sepatutnya Permohonan ini tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

4. Bahwa hal lainnya adalah pada perolehan suara Pemohon sendiri, yang juga terjadi perubahan penambahan dan atau pengurangan dengan pergeseran suara pada beberapa kecamatan, yang akan Pihak Terkait buktikan. Bahkan pada 2 (dua ) kecamatan (Kecamatan Peukan Baro di Kabupaten Pidie dan Kecamatan Bandar Baru di Kabupaten Pidie Jaya), Pengelembungan Perolehan Suara Pemohon lebih dari 100% perolehan suara sebenarnya, setelah dihitung dengan menggunakan C.Hasil Salinan di TPS-TPS pada kedua Kecamatan tersebut.

5. Bahwa Pemohon juga baru membuat Laporan kepada Bawaslu Provinsi Aceh pada tanggal 19 Maret 2024, 1 (satu) hari sebelum KPU mengeluarkan Putusannya. Laporan tersebut sangat tendensius untuk mencarikan dalil, yang sayangnya sudah didetik-detik terakhir, yang jika diakomodir, maka akan menimbulkan permasalahan penundaan pengumuman Hasil Pemilu. Jika memang Pemohon merasa dirugikan, seharusnya Laporan tersebut dilakukan sedari awal.
  
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (***Obscuur Libel***).

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menerima Permohonan Pemohon tersebut.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

### **1. POIN 1 PERMOHONAN PEMOHON.**

1. Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya pergeseran, penggelembungan suara pada perolehan suara Pihak Terkait PKS, PKB, dan PDIP, dan suaranya yang tetap.
2. Pemohon secara sengaja tidak membandingkan dan tidak mencantumkan dalam poin dalilnya, berapa perolehan suaranya. Dan hanya mencantumkan perkiraan perolehan suara Partai lain yang diduga mendapatkan keuntungan dari penggelembungan suara. Faktanya, selain ada pengurangan pada suara Pemohon, lebih banyak yang terjadi adalah penambahan suara pada suara Pemohon.
3. Bahwa menurut Pihak Terkait (PKS), perolehan suara Pemohon dan suara Partai-Partai lainnya (PDIP dan PKB) untuk perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR RI) Daerah Pemilihan

Aceh I, **tidak seperti yang Pemohon dalilkan**. Apalagi Pemohon hanya mendalilkan pada beberapa titik Kecamatan di 6 (enam) Kabupaten dari 15 Kabupaten pada Daerah Pemilihan Aceh I.

4. Untuk Poin 1 Permohonannya, Pemohon hanya menghitung perolehan PDIP pada:
  - a. Kabupaten Pidie (total 18 dari 23 Kecamatan);
  - b. Kabupaten Pidie Jaya (7 dari 8 Kecamatan);
  - c. Kabupaten Subulussalam (total suara Kabupaten, tanpa rincian perolehan suara PDIP maupun suara Pemohon);
  - d. Kabupaten Simeulieue (total suara Kabupaten, tanpa rincian perolehan suara PDIP, maupun suara Pemohon);
  - e. Kota Banda Aceh (4 Kecamatan dari 9 Kecamatan); dan
  - f. Kabupaten Nagan Raya (3 Kecamatan dari 10 Kecamatan).

Klaim untuk penggelembungan yang Pemohon dalilkan, tidak diikuti dengan pembuktian C.Hasil atas semua Kecamatan yang diduga terjadi penggelembungan, tanpa menampilkan penggelembungan yang dilakukan Pemohon.

5. Pemohon tidak mendalilkan berapa perolehan suaranya pada Kecamatan-Kecamatan yang diklaimnya sebagai tempat kejadian penggelembungan suara Partai lain.
6. Pemohon juga tidak menjelaskan penggelembungan dilakukan oleh siapa, bagaimana kejadiannya, pada TPS mana saja. Pemohon hanya mengandalkan asumsi semata.
7. Bahwa terhadap dalil-dalil yang Pemohon sampaikan tentang perhitungan suara PDIP bertambah pada beberapa kabupaten, Pihak Terkait PKS menemukan hal yang tak jauh berbeda dan mencoba membandingkannya dengan perolehan suara PDIP di Desa Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya seperti di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Contoh Perolehan Suara Yang Perlu Diklarifikasi dan Dibuktikan Oleh Pemohon**

TPS	Desa/Kecamatan	PKS	Gerindra	PDIP	PKB
01	Blang Baro/Bandar Baru	0	40	100	37
02	Blang Baro/Bandar Baru	0	21	200	0
03	Blang Baro/Bandar Baru	0	30	200	0
04	Blang Baro/Bandar Baru	0	35	200	0

Angka-angka perolehan tersebut cukup mencengangkan, bulat ratusannya dan yang lain ada yang mendapatkan **0 suara**.

8. **POIN 2 PERMOHONAN PEMOHON.** Dalam poin ini Pemohon mendalilkan perubahan perolehan suara Pihak Terkait (PKS). Dan karenanya Pihak Terkait (PKS) melakukan penghitungan penyesuaian dengan bukti C.Hasil dan atau D.Hasil (dalam hal ini terdapat kekurangan bukti C.Hasil), ternyata perolehan suara Pemohon sendiri bahkan ada yang mengalami **penggelembungan sebesar 2974 suara, 2 kali lipat lebih dari perolehan suara berdasarkan perhitungan C.Hasil.**

Pihak Terkait (PKS) akan mengembalikan perhitungan perolehan suara kembali dengan menggunakan Data C.Hasil Salinan yang Pihak Terkait (PKS) miliki dan melengkapinya dengan bukti dari D.Hasil Kecamatan, Kabko atau Provinsi, dalam hal terdapat kekurangannya.

Sehingga total perolehan suara PKS dan Gerindra, disesuaikan dengan perhitungan yang berdasarkan bukti-bukti yang Pihak Terkait (PKS) sampaikan dengan penjabaran berikut ini:

Pemohon dalam Permohonannya mencantumkan perhitungan di 4 (empat) Kecamatan, maka **Pihak Terkait PKS dalam hal ini membantah perhitungan tersebut dan mendalilkan penghitungan suara berdasarkan C.Hasil Salinan dan atau D.Hasil Kecamatan, dan**

atau D.Hasil Kabko pada 3 kota/kabupaten, pada Kecamatan yang Pemohon maksudkan, dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

- (1) Rekapitan Perbandingan Suara Gerindra di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan C Hasil Yang diajukan Pihak Terkait PKS.

Tabel 4

No. Bukti	TPS	DESA/KECAMATAN BANDAR BARU	Gerindra
PT-06	01	Cut Nyong/Bandar Baru	28
PT-07	02	Cut Nyong/Bandar Baru	23
PT-08	01	Mns Gampong/Bandar Baru	30
PT-09	02	Mns Gampong/Bandar Baru	68
PT-10	01	Pulo Rheng/Bandar Baru	25
PT-11	01	Dayah Nyong/Bandar Baru	13
PT-12	02	Dayah Nyong/Bandar Baru	24
PT-13	01	Daboih/Bandar Baru	15
PT-14	02	Daboih/Bandar Baru	14
PT-15	01	Beurandeh/Bandar Baru	9
PT-16	02	Beurandeh/Bandar Baru	16
PT-17	01	Kaye Raya/Bandar Baru	4
PT-18	02	Kaye Raya/Bandar Baru	11
PT-19	01	Blang Glong/Bandar Baru	36
PT-20	02	Blang Glong/Bandar Baru	30
PT-21	01	Tutong/Bandar Baru	11
PT-22	02	Tutong/Bandar Baru	30
PT-23	01	Siren/Bandar Baru	10
PT-24	02	Siren/Bandar Baru	19
PT-25	03	Siren/Bandar Baru	10
PT-26	01	Keude Leung Putu/Bandar Baru	31
PT-27	02	Keude Leung Putu/Bandar Baru	19
PT-28	03	Keude Leung Putu/Bandar Baru	24
PT-29	04	Keude Leung Putu/Bandar Baru	26
PT-30	05	Keude Leung Putu/Bandar Baru	18
PT-31	01	Gp.Pueb L.Nibong/Bandar Baru	7
PT-32	02	Gp.Pueb L.Nibong/Bandar Baru	8
PT-33	03	Gp.Pueb L.Nibong/Bandar Baru	6
PT-34	01	Teungoh Musa/Bandar Baru	37

No. Bukti	TPS	DESA/KECAMATAN BANDAR BARU	Gerindra
PT-35	02	Teungoh Musa/Bandar Baru	39
PT-36	03	Teungoh Musa/Bandar Baru	45
PT-37	01	Balee/Bandar Baru	70
PT-38	02	Balee/Bandar Baru	70
PT-39	03	Bale/Bandar Baru	70
PT-40	01	Udeung/Bandar Baru	17
PT-41	02	Udeung/Bandar Baru	17
PT-42	03	Udeung/Bandar Baru	19
PT-43	04	Udeung/Bandar Baru	24
PT-44	01	Ara/Bandar Baru	7
PT-45	02	Ara/Bandar Baru	7
PT-46	03	Ara/Bandar Baru	12
PT-47	01	Baroh Lancok/Bandar Baru	11
PT-48	02	Baroh Lancok/Bandar Baru	10
PT-49	03	Baroh Lancok/Bandar Baru	13
PT-50	04	Baroh Lancok/Bandar Baru	19
PT-51	05	Baroh Lancok/Bandar Baru	15
PT-52	01	Manyang/Bandar Baru	24
PT-53	02	Manyang/Bandar Baru	20
PT-54	01	Mesjid/Bandar Baru	14
PT-55	02	Mesjid/Bandar Baru	15
PT-56	01	Pulo Pueb/Bandar Baru	19
PT-57	02	Pulo Pueb/Bandar Baru	17
PT-58	03	Pulo Pueb/Bandar Baru	24
PT-59	01	Sawang/Bandar Baru	7
PT-60	02	Sawang/Bandar Baru	4
PT-61	01	Tualada/Bandar Baru	14
PT-62	02	Tualada/Bandar Baru	6
PT-63	01	Cut Langien/Bandar Baru	29
PT-64	02	Cut Langien/Bandar Baru	20
PT-65	01	Gampong Sagoe/Bandar Baru	18
PT-66	02	Sagoe/Bandar Baru	17
PT-67	03	Sagoe/Bandar Baru	25
PT-68	PT-	Pt-	PT-
PT-69	01	Baroh Cot/Bandar Baru	22
PT-70	02	Baroh Cot/Bandar Baru	20

No. Bukti	TPS	DESA/KECAMATAN BANDAR BARU	Gerindra
PT-71	03	Baroh Cot/Bandar Baru	17
PT-72	01	Blang Iboih/Bandar Baru	73
PT-73	02	Blang Iboih/Bandar Baru	69
PT-74	01	Blang Baro/Bandar Baru	40
PT-75	02	Blang Baro/Bandar Baru	21
PT-76	03	Blang Baro/Bandar Baru	30
PT-77	04	Blang Baro/Bandar Baru	35
PT-78	01	Lancang/Bandar Baru	7
PT-79	02	Lancang/Bandar Baru	4
PT-80	03	Lancang/Bandar Baru	2
PT-81	04	Lancang/Bandar Baru	13
PT-82	01	Paru Keude/Bandar Baru	38
PT-83	02	Paru Keude/Bandar Baru	29
PT-84	03	Paru Keude/Bandar Baru	35
PT-85	04	Paru Keude/Bandar Baru	74
PT-86	05	Paru Keude/Bandar Baru	46
PT-87	06	Paru Keude/Bandar Baru	70
PT-88	07	Paru Keude/Bandar Baru	63
PT-89	01	Jijiem/Bandar Baru	42
PT-90	02	Jijiem/Bandar Baru	72
PT-91	01	Sarah Panyang/Bandar Baru	41
	02	Sarah Panyang/Bandar Baru (dilihat pada D Hasil Kecamatan PT-98)	28
PT-92	01	Ujong Leubat/Bandar Baru	12
PT-93	02	Ujong Lebat/Bandar Baru	10
PT-94	01	Alue/Bandar Baru	65
PT-95	01	Tanoh Mirah/Bandar Baru	18
PT-96	01	Paru Cot/Bandar Baru	7
PT-97	02	Paru Cot/Bandar Baru	8
		<b>Total C Hasil</b>	<b>2.412</b>
PT-98		<b>Total D Hasil Kecamatan Bandar Baru</b>	<b>5.386</b>
		<b>Selisih D Hasil -C Hasil</b>	<b>Lebih 2.974</b>

(2) **Rekapan Perbandingan Suara Gerindra, Di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan C Hasil Yang diajukan Pihak Terkait PKS.**

**Tabel 5**

No. Bukti	TPS	DESA/KECAMATAN DARUL IMARAH	Gerindra
PT-99	01	Lampeuneurut Ujong Blang/Darul Imarah	5
PT-100	02	Lampeuneurut Ujong Blang/Darul Imarah	6
PT-101	03	Lampeuneurut Ujong Blang/Darul Imarah	1
PT-102	04	Lampeuneurut Ujong Blang/Darul Imarah	5
PT-103	05	Lampeuneurut Ujong Blang/Darul Imarah	3
PT-104	06	Lampeuneurut Ujong Blang/Darul Imarah	2
PT-105	01	Lampeuneureut Gampong/Darul Imarah	7
PT-106	02	Lampeuneureut Gampong/Darul Imarah	5
PT-107	03	Lampeuneureut Gampong/Darul Imarah	7
PT-108	01	Lamreung/Darul Imarah	4
PT-109	02	Lamreung/Darul Imarah	1
PT-110	03	Lamreung/Darul Imarah	5
PT-111	04	Lamreung/Darul Imarah	2
PT-112	05	Lamreung/Darul Imarah	2
PT-113	06	Lamreung/Darul Imarah	2
PT-114	07	Lamreung/Darul Imarah	4
PT-115	01	Lamcot/Darul Imarah	8
PT-116	02	Lamcot/Darul Imarah	5
	03	Lamcot/Darul Imarah (Lihat PT-241)	2
PT-117	04	Lamcot/Darul Imarah	3
PT-118	05	Lamcot/Darul Imarah	5
PT-119	06	Lamcot/Darul Imarah	4
PT-120	01	Lamblang Trieng/Darul Imarah	1
PT-121	02	Lamblang Trieng/Darul Imarah	1
PT-122	03	Lamblang Trieng/Darul Imarah	9
PT-123	01	Lamblang Manyang/Darul Imarah	1
PT-124	02	Lamblang Manyang/Darul Imarah	3
PT-125	03	Lamblang Manyang/Darul Imarah	4
PT-126	01	Bayu/Darul Imarah	2
PT-127	02	Bayu/Darul Imarah	3
PT-128	03	Bayu/Darul Imarah	3
PT-129	04	Bayu/Darul Imarah	3

No. Bukti	TPS	DESA/KECAMATAN DARUL IMARAH	Gerindra
PT-130	05	Bayu/Darul Imarah	8
PT-131	01	Lagang/Darul Imarah	3
PT-132	02	Lagang/Darul Imarah	5
PT-133	01	Lamsiteh/Darul Imarah	5
PT-134	02	Lamsiteh/Darul Imarah	4
PT-135	01	Lamkawe/Darul Imarah	1
PT-136	02	Lamkawe/Darul Imarah	4
PT-137	01	Leu Blang/Darul Imarah	1
PT-138	02	Leu Blang/Darul Imarah	3
PT-139	03	Leu Blang/Darul Imarah	1
PT-140	01	Payaroh/Darul Imarah	2
PT-141	02	Payaroh/Darul Imarah	3
PT-142	03	Payaroh/Darul Imarah	8
PT-143	01	Lamsidaya/Darul Imarah	2
PT-144	02	Lamsidaya/Darul Imarah	4
PT-145	03	Lamsidaya/Darul Imarah	2
PT-146	01	Kuta Karang/Darul Imarah	2
PT-147	02	Kuta Karang/Darul Imarah	0
PT-148	01	Leugeu/Darul Imarah	4
PT-149	02	Leugeu/Darul Imarah	1
PT-150	01	Lampeuneun/Darul Imarah	2
PT-151	02	Lampeuneun/Darul Imarah	4
PT-152	01	Lamtheun/Darul Imarah	2
PT-153	02	Lamtheun/Darul Imarah	3
PT-154	03	Lamtheun/Darul Imarah	2
PT-155	01	Deunong/Darul Imarah	5
PT-156	02	Deunong/Darul Imarah	1
PT-157	03	Deunong/Darul Imarah	7
PT-158	01	Tingkeum/Darul Imarah	4
PT-159	02	Tingkeum/Darul Imarah	2
PT-160	03	Tingkeum/Darul Imarah	5
PT-161	04	Tingkeum/Darul Imarah	4
PT-162	01	Kandang/Darul Imarah	3
PT-163	01	Lam Bheu/Darul Imarah	2
PT-164	02	Lam Bheu/Darul Imarah	2
PT-165	03	Lam Bheu/Darul Imarah	3

No. Bukti	TPS	DESA/KECAMATAN DARUL IMARAH	Gerindra
PT-166	04	Lam Bheu/Darul Imarah	10
PT-167	05	Lam Bheu/Darul Imarah	5
PT-168	06	Lam Bheu/Darul Imarah	8
PT-169	07	Lam Bheu/Darul Imarah	6
PT-170	08	Lam Bheu/Darul Imarah	1
PT-171	09	Lam Bheu/Darul Imarah	6
PT-172	10	Lam Bheu/Darul Imarah	1
PT-173	11	Lam Bheu/Darul Imarah	3
PT-174	12	Lam Bheu/Darul Imarah	4
PT-175	13	Lam Bheu/Darul Imarah	6
PT-176	01	Daroy Kameu/Darul Imarah	2
PT-177	02	Daroy Kameu/Darul Imarah	2
PT-178	01	Gendrieng/Darul Imarah	5
PT-179	02	Gendrieng/Darul Imarah	6
PT-180	01	Garot/Darul Imarah	5
PT-181	02	Garot/Darul Imarah	1
PT-	03	Garot/Darul Imarah (Lihat PT-241)	4
PT-182	04	Garot/Darul Imarah	7
PT-183	05	Garot/Darul Imarah	6
PT-184	06	Garot/Darul Imarah	7
PT-185	07	Garot/Darul Imarah	6
PT-186	08	Garot/Darul Imarah	4
PT-187	09	Garot/Darul Imarah	4
PT-188	10	Garot/Darul Imarah	4
PT-189	11	Garot/Darul Imarah	5
PT-190	12	Garot/Darul Imarah	5
PT-191	01	Pasheu Beutong/Darul Imarah	12
PT-192	02	Pasheu Beutong/Darul Imarah	12
PT-193	03	Pasheu Beutong/Darul Imarah	12
PT-194	04	Pasheu Beutong/Darul Imarah	14
PT-195	01	Lampasi Engking/Darul Imarah	8
PT-196	02	Lampasi Engking/Darul Imarah	5
PT-197	03	Lampasi Engking/Darul Imarah	0
PT-198	04	Lampasi Engking/Darul Imarah	6
PT-199	05	Lampasi Engking/Darul Imarah	4
PT-200	06	Lampasi Engking/Darul Imarah	3

No. Bukti	TPS	DESA/KECAMATAN DARUL IMARAH	Gerindra
PT-201	01	Jeumpet Ajun/Darul Imarah	6
PT-202	02	Jeumpet Ajun/Darul Imarah	3
	03	Jeumpet Ajun/Darul Imarah (lihat PT-241)	11
PT-203	04	Jeumpet Ajun/Darul Imarah	4
	05	Jeumpet Ajun/Darul Imarah (lihat PT-241)	9
PT-204	06	Jeumpet Ajun/Darul Imarah	5
PT-205	01	Gue Gajah/Darul Imarah	8
PT-206	02	Gue Gajah/Darul Imarah	3
PT-207	03	Gue Gajah/Darul Imarah	6
PT-208	04	Gue Gajah/Darul Imarah	8
PT-209	05	Gue Gajah/Darul Imarah	6
PT-210	06	Gue Gajah/Darul Imarah	6
PT-211	07	Gue Gajah/Darul Imarah	3
PT-212	08	Gue Gajah/Darul Imarah	6
PT-213	09	Gue Gajah/Darul Imarah	7
PT-214	10	Gue Gajah/Darul Imarah	9
PT-215	11	Gue Gajah/Darul Imarah	4
PT-216	12	Gue Gajah/Darul Imarah	5
PT-217	13	Gue Gajah/Darul Imarah	5
PT-218	14	Gue Gajah/Darul Imarah	8
PT-219	15	Gue Gajah/Darul Imarah	1
PT-220	01	Leu Ue/Darul Imarah	12
PT-221	02	Leu Ue/Darul Imarah	1
PT-222	03	Leu Ue/Darul Imarah	6
PT-223	04	Leu Ue/Darul Imarah	4
PT-224	05	Leu Ue/Darul Imarah	7
PT-225	01	Ulee Lueng/Darul Imarah	7
PT-226	02	Ulee Lueng/Darul Imarah	0
PT-227	03	Ulee Lueng/Darul Imarah	3
PT-228	01	Punie/Darul Imarah	3
PT-229	02	Punie/Darul Imarah	17
PT-230	03	Punie/Darul Imarah	3
PT-231	04	Punie/Darul Imarah	42
PT-232	05	Punie/Darul Imarah	2
PT-233	06	Punie/Darul Imarah	6
PT-234	07	Punie/Darul Imarah	5

No. Bukti	TPS	DESA/KECAMATAN DARUL IMARAH	Gerindra
PT-235	08	Punie/Darul Imarah	10
PT-236	01	Ulee Tuy/Darul Imarah	12
PT-237	02	Ulee Tuy/Darul Imarah	4
PT-238	03	Ulee Tuy/Darul Imarah	10
PT-239	04	Ulee Tuy/Darul Imarah	4
PT-240	05	Ulee Tuy/Darul Imarah	6
PT-241		<b>Total C Hasil Salinan Darul Imarah</b>	<b>718</b>
		<b>Total D Hasil</b>	<b>692</b>
		<b>Selisih D Hasil - C Hasil</b>	<b>Kurang 26</b>

- (3) **Rekapan Perbandingan Suara Gerindra, di Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie Berdasarkan C Hasil Yang diajukan Pihak Terkait PKS.**

**Tabel 6**

No. Bukti	TPS	DESA/KECAMATAN PEUKAN BARO	Gerindra
PT-242	01	Dua Raya/Peukan Baro	12
PT-243	02	Dua Raya/Peukan Baro	19
PT-244	03	Dua Raya/Peukan Baro	22
	01	Cot Mulu/Peukan Baro (Lihat PT-288)	27
PT-245	02	Cot Mulu/Peukan Baro	32
PT-246	01	Dayah Bubue/Peukan Baro	38
PT-247	02	Dayah Bubue/Peukan Baro	26
PT-248	03	Dayah Bubue/Peukan Baro	23
PT-249	01	Sumbok Buga/Peukan Baro	12
PT-250	01	Tanjung Hagu/Peukan Baro	21
PT-251	01	Rambayan Kupula/Peukan Baro	11
PT-252	02	Rambayan Kupula/Peukan Baro	8
PT-253	01	Peunayong/Peukan Baro	18
PT-254	01	Leuhop/Peukan Baro	5
PT-255	01	Kumbang Waido/Peukan Baro	37
PT-256	01	Gamong Waido/Peukan Baro	32

No. Bukti	TPS	DESA/KECAMATAN PEUKAN BARO	Gerindra
PT-257	01	Lueng Guci Rumpong/Peukan Baro	22
PT-258	02	Lueng Guci Rumpong/Peukan Baro	18
	01	Dayahseumideun/Peukan Baro (Lihat PT-288)	57
PT-259	02	Dayahseumideun/Peukan Baro	28
PT-260	01	Mesjid Guci Rumpong/Peukan Baro	51
PT-261	01	Reuba Waido/Peukan Baro	30
PT-262	01	Dayah Teungku/Peukan Baro	13
PT-263	01	Balee Rastong/Peukan Baro	1
PT-264	02	Balee Rastong/Peukan Baro	16
PT-265	01	Lueng Mesjid/Peukan Baro	27
PT-266	02	Lueng Mesjid/Peukan Baro	26
PT-267	01	Teungoh Baroh/Peukan Baro	6
PT-268	02	Teungoh Baroh/Peukan Baro	8
PT-269	01	Mee Hagu/Peukan Baro	13
PT-270	01	Dayah Sukon/Peukan Baro	10
PT-271	02	Dayah Sukon/Peukan Baro	16
PT-272	01	Blang Raya/Peukan Baro	23
PT-273	02	Blang Raya/Peukan Baro	20
PT-274	01	Balee Pineung/Peukan Baro	30
PT-275	02	Balee Pineung/Peukan Baro	11
PT-276	01	Mee Tanoh/Peukan Baro	2
PT-277	01	Sialet-Alet/Peukan Baro	12
PT-278	01	Bluek Arab/Peukan Baro	1
PT-279	01	Puuk/Peukan Baro	14
PT-280	01	Dayah Muara/Peukan Baro	8
PT-281	02	Dayah Muara/Peukan Baro	3
PT-282	01	Sawite/Peukan Baro	25
PT-283	01	Jim/Peukan Baro	13
	01	Meuleuweuk/Peukan Baro (Lihat PT-288)	10
PT-284	02	Meuleuweuk/Peukan Baro	12
PT-285	01	Sukon Krueng Seumideun/Peukan Baro	4
PT-286	01	Ulee Cot Seupeng/Peukan Baro	10
PT-287	01	Kabat/Peukan Baro	13
		<b>Total C Hasil</b>	<b>896</b>
PT-288		<b>Total D Hasil Kecamatan Peukan Baro</b>	<b>2.132</b>

No. Bukti	TPS	DESA/KECAMATAN PEUKAN BARO	Gerindra
		Selisih D Hasil- C Hasil	Lebih 1.236

(4) **Rekapan Perbandingan Suara Gerindra, di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie Berdasarkan C Hasil Yang diajukan Pihak Terkait PKS.**

**Tabel 7**

No. Bukti	TPS	DESA PIDIE/ KECAMATAN PIDIE	Gerindra
PT-289	01	Tijue/Pidie	8
PT-290	02	Tijue/Pidie	3
PT-291	03	Tijue/Pidie	18
PT-292	04	Tijue/Pidie	15
PT-293	01	Lampeudeu Tunong/Pidie	17
PT-294	02	Lampeudeu Tunong/Pidie	13
PT-295	03	Lampeudeu Tunong/Pidie	27
PT-296	03	Puuk/Pidie	3
PT-297	01	Lampeudeu Baroh/Pidie	43
PT-298	02	Lampeudeu Baroh/Pidie	41
PT-299	01	Paya/Pidie	25
PT-300	01	Mesjid Pantoh/Pidie	30
PT-301	02	Mesjid Pantoh/Pidie	38
PT-302	01	Dayah Teungoh/Pidie	16
PT-303	02	Dayah Teungoh/Pidie	12
PT-304	01	Baroh/Pidie	24
PT-305	02	Baroh/Pidie	19
PT-306	03	Baroh/Pidie	14
PT-307	01	Dayah Tanoh/Pidie	15
PT-308	02	Dayah Tanoh/Pidie	12
PT-309	01	Cot Geunduek/Pidie	9
PT-310	02	Cot Geunduek/Pidie	18
PT-311	01	Tumpok Laweung/Pidie	12
PT-312	02	Tumpok Laweung/Pidie	15
PT-313	01	Ulee Ceue Keulibeut/Pidie	11
PT-314	02	Ulee Ceue Keulibeut/Pidie	18

No. Bukti	TPS	DESA PIDIE/ KECAMATAN PIDIE	Gerindra
PT-315	01	Keude Keulibet/Pidie	15
PT-316	02	Keude Keulibet/Pidie	20
PT-317	01	Ulee Tutue/Pidie	65
PT-318	01	Dayah Tutong/Pidie	7
PT-319	02	Dayah Tutong/Pidie	15
PT-320	01	Lampoh Lada/Pidie	7
PT-321	02	Lampoh Lada/Pidie	6
PT-322	01	Keuniree/Pidie	20
PT-323	02	Keuniree/Pidie	24
PT-324	03	Keuniree/Pidie	20
PT-325	01	Tumpok 40/Pidie	11
PT-326	02	Tumpok 40/Pidie	16
PT-327	01	Cot Teungoh/Pidie	15
	02	Cot Teungoh/Pidie (lihat PT-414)	16
PT-328	02	Cothreng/Pidie	
PT-329	01	Labui/Pidie	2
PT-330	02	Labui/Pidie	8
PT-331	01	Gampong/Pidie	7
PT-332	01	Pulo Pisang/Pidie	4
PT-333	02	Pulo Pisang/Pidie	2
PT-334	03	Pulo Pisang/Pidie	3
PT-335	01	Lamkuta/Pidie	7
PT-336	01	Kampong Pukat/Pidie	8
PT-337	02	Kampong Pukat/Pidie	5
PT-338	01	Kampong Barat/Pidie	5
PT-339	02	Kampong Barat/Pidie	6
PT-340	01	Paloh/Pidie	12
PT-341	02	Paloh/Pidie	15
PT-342	03	Paloh/Pidie	7
PT-343	04	Paloh/Pidie	11
PT-344	01	Kampong Baro/Pidie	9
PT-345	02	Kampong Baro/Pidie	5
PT-346	03	Kampong Baro/Pidie	8
PT-347	04	Kampong Baro/Pidie	6
PT-348	01	Pulo Bubee/Pidie	17
PT-349	02	Pulo Bubee/Pidie	13

No. Bukti	TPS	DESA PIDIE/ KECAMATAN PIDIE	Gerindra
PT-350	01	Tibang/Pidie	15
PT-351	02	Tibang/Pidie	25
PT-352	01	Rawa/Pidie	10
	02	Rawa/Pidie (Lihat PT-414)	22
PT-353	03	Rawa/Pidie	14
PT-354	04	Rawa/Pidie	7
PT-355	05	Rawa/Pidie	15
PT-356	06	Rawa/Pidie	12
PT-357	07	Rawa/Pidie	6
PT-358	01	Peukan Baro/Pidie	14
PT-359	02	Peukan Baro/Pidie	9
PT-360	01	Mancang/Pidie	3
PT-361	02	Mancang/Pidie	4
PT-362	01	Gajah Ayee/Pidie	68
PT-363	02	Gajah Ayee/Pidie	66
PT-364	03	Gajah Ayee/Pidie	86
PT-365	04	Gajah Ayee/Pidie	80
PT-366	05	Gajah Ayee/Pidie	48
PT-367	06	Gajah Ayee/Pidie	31
PT-368	01	Lhok Keutapang/Pidie	21
PT-369	02	Lhok Keutapang/Pidie	16
PT-370	03	Lhok Keutapang/Pidie	19
PT-371	04	Lhok Keutapang/Pidie	9
PT-372	01	Dalueng/Pidie	11
PT-373	02	Dalueng/Pidie	9
PT-374	01	Meucat Teubeng/Pidie	9
PT-375	02	Meucat Teubeng/Pidie	11
PT-376	01	Dayah Teubeng/Pidie	11
PT-377	02	Dayah Teubeng/Pidie	13
PT-378	01	Tanjung Teubeng/Pidie	2
PT-379	02	Tanjung Teubeng/Pidie	5
PT-380	01	Bayu Teubeng/Pidie	23
PT-381	01	Abo Teubeng/Pidie	14
PT-382	02	Abo Teubeng/Pidie	10
PT-383	01	Keutapang Sanggeue	2
PT-384	01	Krueng Ditoe/Pidie	22

No. Bukti	TPS	DESA PIDIE/ KECAMATAN PIDIE	Gerindra
PT-385	02	Krueng Ditoe/Pidie	23
PT-386	03	Krueng Ditoe/Pidie	17
PT-387	01	Sirong/Pidie	5
PT-388	02	Sirong/Pidie	6
PT-389	01	Keutumbu/Pidie	10
PT-390	01	Jeumpa/Pidie	6
PT-391	02	Jeumpa/Pidie	5
PT-392	01	Raya Sanggeue/Pidie	6
PT-393	02	Raya Sanggeue/Pidie	5
PT-394	01	Jeuleupee/Pidie	2
PT-395	01	Ujung Langgo/Pidie	28
PT-396	01	Cot Glumpang/Pidie	3
PT-397	02	Cot Glumpang/Pidie	7
PT-398	01	Seuriweuk/Pidie	3
PT-399	02	Seuriwek/Pidie	6
PT-400	01	Mesjid Utue/Pidie	21
PT-401	01	Leubue/Pidie	8
PT-402	01	Raya Utue/Pidie	15
PT-403	02	Raya Utue/Pidie	3
PT-404	01	Seukembrok/Pidie	9
PT-405	02	Seukembrok/Pidie	8
PT-406	01	Bie/Pidie	21
PT-407	02	Bie/Pidie	15
PT-408	01	Blang Kula/Pidie	8
PT-409	02	Blang Kula/Pidie	8
PT-410	01	Alue/Pidie	5
PT-411	01	Seuke/Pidie	42
PT-412	01	Paya Linteung/Pidie	8
PT-413	01	Puli/Pidie	6
		<b>Total C Hasil</b>	<b>1.944</b>
PT-414		<b>Total Model D Hasil Kecamatan Pidie</b>	<b>2.888</b>
		Model D Hasil Kabko DPR, Kabupaten/Kota Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh I Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	

No. Bukti	TPS	DESA PIDIE/ KECAMATAN PIDIE	Gerindra
		Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024.	
		Selisih D Hasil dengan C Hasil	<b>Lebih 944</b>

8. Klaim untuk penggelembungan yang Pemohon dalilkan, tidak diikuti dengan pembuktian C.Hasil Salinan untuk semua Kecamatan yang diduganya terjadi penggelembungan, dan didalilkan tanpa menampilkan penggelembungan yang dilakukan Pemohon sendiri.
9. Dengan melihat pada Bukti Perolehan Suara pada 4 Kecamatan pada 3 Kabupaten yang Pemohon dalilkan, justru yang terjadi adalah adanya penggelembungan suara Pemohon sendiri, selain ada juga pengurangan suara Pemohon, tetapi jumlahnya tidak signifikan dengan penggelembungan suara untuk Pemohon.

No.	Kecamatan/ Kabupaten/Kota	Perolehan Suara C Hasil Salinan	Suara Perhitungan Pada( Hasil Salinan	Selisih Suara Pemohon
1	Bandar Baru/Pidie Jaya	2.412	5.386	2.974
2	Darul Imarah/Aceh Besar	718	692	- 26
3	Peukan Baro/Pidie	896	2.132	1.236
4	Pidie/Pidie	1.944	2.888	944
<b>Total Penggelembungan Suara Pemohon</b>				<b>5.128</b>

10. Dengan penggelembungan Suara Pemohon sebesar 5.128 suara, maka Perolehan Suara Pemohon seharusnya menjadi:

<b>104.005</b>	-	<b>5.128</b>	=	<b>98.877</b>
----------------	---	--------------	---	---------------

11. POIN 3 PERMOHONAN PEMOHON. Pemohon Gerindra mendalilkan terjadinya penggelembungan suara oleh PKB. Pihak Terkait PKS dalam hal ini mengikuti pembuktian yang dilakukan Pemohon Gerindra terhadap perubahan suara PKB di Kecamatan-kecamatan yang didalilkannya.

## **PETITUM**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait (PKS);
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Aceh I untuk pengisian Anggota DPR RI.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I adalah sebagai berikut:

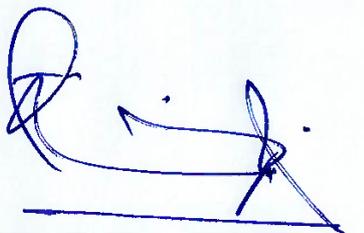
PARTAI	PEROLEHAN SUARA
GERINDRA	98.877
PDIP	133.292
PKS	<b>119.581</b>
PKB	106.667

Atau

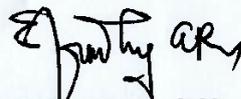
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

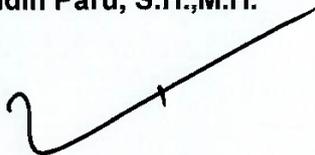
Kuasa Hukum  
Pihak Terkait



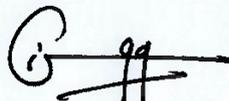
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.



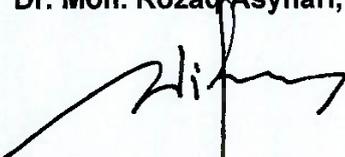
2. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.



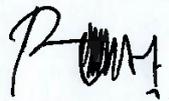
3. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.



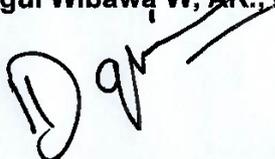
4. Anggi Aribowo, S.H., M.H.



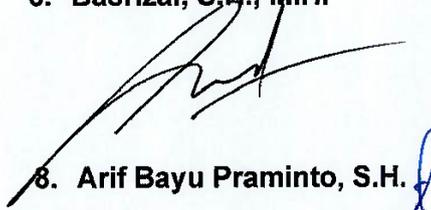
5. Unggul Wibawa W, AK., S.H., M.H.



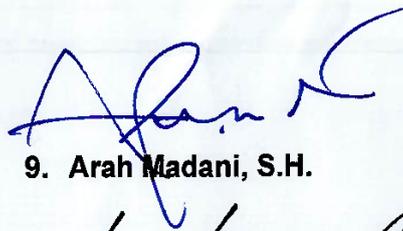
6. Basrizal, S.H., M.H.



7. Aristya Kusuma Dewi, S.H.



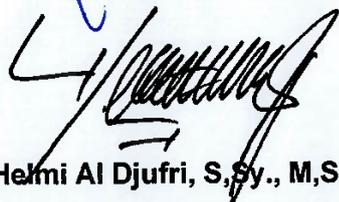
8. Arif Bayu Praminto, S.H.



9. Arah Madani, S.H.



10. Muhammad Arnif, S.H.



11. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.



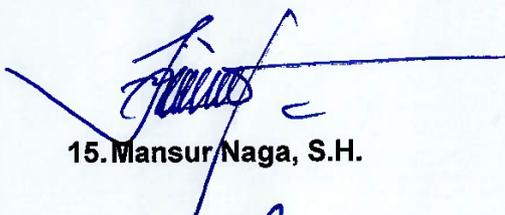
12. Hoirullah S.Sy., M.H.



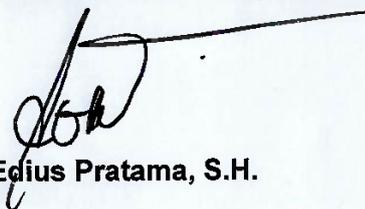
13. Joko P. Prabowo, S.H., M.Kn.



14. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.



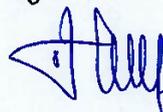
15. Mansur Naga, S.H.



16. Edius Pratama, S.H.



17. Seta M.C. Wahyuono, S.H., M.H.



18. Heru Julianto, S.H.



19. Faisal, S.H.



20. Taufiq Hidayat, S.H.